

BAB II

DISKURSUS PEMBANGUNAN GLOBAL

Diskursus pembangunan selalu berubah, termasuk karakteristik diskursus pembangunan yang secara berbeda berkontribusi setiap periodenya. Namun tidak semua diskursus pembangunan dapat menjadi diskursus dominan. Ada diskursus yang bertahan, hanya dianut sebagian kecil kelompok, atau bahkan tidak pernah lagi digunakan. Oleh karena itu dalam bab ini terdapat dua pokok bahasan. Pertama, yaitu penjelasan mengenai perkembangan diskursus pembangunan global yang disertai dengan karakteristik diskursus setiap periodenya. Kedua, yaitu penjelasan mengenai pembangunan ekonomi dan prosesnya menjadi sebuah diskursus pembangunan global yang masih dominan hingga abad ke-21.

2.1 Perkembangan Diskursus Pembangunan Global

Perkembangan diskursus pembangunan telah dijabarkan oleh Björn Hettne dalam bukunya yang berjudul *“Sustainable Development in A Globalized World: Studies in Development, Security and Culture”*. Dalam bukunya, Hettne menjelaskan mengenai periodisasi diskursus pembangunan, beserta karakteristik dan pergantian diskursus pembangunan global. Penjelasan juga dilengkapi dengan pembagian diskursus pembangunan menurut Ziai Aram dalam bukunya yang berjudul *“Development Discourse and Global History: From colonialism to the sustainable development goals”*. Menggunakan kerangka perkembangan diskursus pembangunan global yang dikemukakan oleh Björn Hettne, diskursus pembangunan global dapat terbagi menjadi empat periode.

2.1.1 Masa Berkembangnya Diskursus Pembangunan

Masa ini terjadi pada rentang tahun 1750-1815. Diskursus pembangunan yang pertama kali berkembang adalah Merkantilisme. Diskursus yang sudah mulai berkembang pada abad ke-16 ini identik dengan keterlibatan negara yang berbeda-beda antar-negara dan antar-kelas masyarakat. Merkantilisme ini muncul di seluruh kawasan Eropa dan banyak didukung oleh pebisnis, ahli ekonomi, dan aktor-aktor lainnya. Dasar pemikiran Merkantilisme yaitu bahwa aktivitas ekonomi sangat penting dengan dukungan peningkatkan produksi dan ekspor sebagai penopangnya (Faculty of Economic Sciences University of Warsaw, 2018). Sehingga mereka yang menganut diskursus Merkantilisme akan berusaha untuk mengurangi jumlah impor barang melalui kebijakan proteksionis, seperti pemberlakuan tarif, kuota, pajak tinggi barang impor, dan subsidi barang-barang lokal atau domestik. Tindakan ini juga tidak lepas dari asumsi Merkantilisme bahwa pemerintah dapat mengintervensi pasar dengan tujuan meningkatkan produksi ekonomi (Faculty of Economic Sciences University of Warsaw, 2018).

Hal tersebut juga sesuai dengan asumsi Merkantilisme bahwa perdagangan merupakan *zero-sum game* (Pincus, 2012). Dalam konteks ini, *zero-sum game* dapat dipahami bahwa perdagangan hanya memberikan manfaat atau keuntungan pada satu pihak saja (Kemenkeu RI, 2017). Pola pikir ini semakin diperkuat dengan pemahaman Merkantilisme bahwa semakin banyak uang berarti semakin banyak investasi yang masuk dalam suatu negara. Dengan semakin banyak uang yang mereka peroleh, maka akan semakin mendorong peningkatan aktivitas produksi suatu negara. Oleh karena itu salah satu

aktualisasi dari Merkantilisme ini adalah bagaimana negara dapat menciptakan *balance of trade*, sehingga negara dapat terus mendapatkan keuntungan (*profit*) (Hettne, 2008). Apabila *balance of trade* terjadi, maka secara tidak langsung akan berkontribusi terhadap kesejahteraan negara dan masyarakatnya.

Namun diskursus pembangunan Merkantilisme tersebut mulai menuai banyak kritik, salah satunya dari *Physiocrats* dengan diskursus pembangunan *Physiocratic*. Asal kata *physiocratic* sendiri berarti hukum alam (*rule of nature*) (Steckel, 2008). Diskursus ini muncul pada renatang tahun 1750-1780 (Faculty of Economic Sciences University of Warsaw, 2018). Kemunculannya berupa sebuah gerakan yang bermula di Perancis, terutama ketika Jean-Baptiste Colbert, seorang menteri keuangan Perancis pada masa Raja Louis XIV, mengeluarkan kebijakan ekonomi Merkantilisme (Reynolds, 2000). Asumsi utama dalam *Physiocratic* ini yaitu bahwa tidak ada campur tangan pemerintah atau negara dalam perekonomian, dan menyerahkan ekonomi berjalan berdasarkan mekanisme pasar. Beberapa contoh penerapannya adalah adanya hak untuk bertahan hidup, kewajiban untuk menghormati hak milik orang lain, dan sebagainya (Faculty of Economic Sciences University of Warsaw, 2018). Hal ini tentu sangat berbanding terbalik dengan diskursus Merkantilisme yang menempatkan pemerintah sebagai aktor krusial dalam mengatur perekonomian.

Diskursus ini berkembang saat perekonomian dalam kondisi tumbuh lambat, teknologi pertanian yang masih tradisional, banyak terjadi kelaparan, perang, dan intervensi pemerintah dalam perekonomian yang masih sangat populer (Faculty of Economic Sciences University of Warsaw, 2018). Oleh karena itu *Physiocratism*

memiliki asumsi bahwa *land development* dan produk-produk pertanian berperan penting sebagai sumber dari kesejahteraan (Hettne, 2008). Hal ini tidak lepas dari pentingnya sebuah gagasan *idea of progress* yang berkembang pada masa Abad Pencerahan. *Idea of progress* tersebut dimaknai sebagai peningkatan kualitas hidup manusia dalam sebuah fase evolusi. Dimana menurut Turgot, salah satu pencetus diskursus *Physiocratism*, tujuan akhir dalam sebuah perekonomian adalah membawa ke dalam masa modernisasi (Hettne, 2008). Mereka membawa tujuan universal, bahwa seluruh umat manusia harus bisa berevolusi menjadi umat manusia yang lebih modern.

Namun diskursus *Physiocratism* ini pun mendapat banyak kritik, karena secara tidak langsung mengarahkan pembangunan yang modern secara universal. Padahal karakteristik setiap negara di dunia sangat berbeda dan memiliki cara masing-masing untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Setiap negara memiliki cara sendiri dalam pembangunan, seperti mereka yang masih menerapkan pembangunan yang berdasarkan pada tradisi, agama, dan sistem paternal (Hettne, 2008).

2.1.2 Masa Revolusi Industri

Periode ini terjadi pada rentang waktu 1815-1914. Revolusi Industri ini sendiri berawal di Inggris yang ditandai dengan munculnya industri tekstil, beralihnya industri batu bara ke industri baja, penyempurnaan mesin-mesin produksi, dan lain sebagainya (Allen, 2006). Bahkan pada awal abad ke-19, kapas, benang, baja, menjadi produk-produk dengan jumlah produksi terbanyak ke-6 di Inggris, dengan 70%-

nya diproduksi untuk memenuhi kebutuhan ekspor (Tilly, 2010). Di periode ini pula diskursus pembangunan ekonomi mulai muncul.

Faktor utama yang menandai berkembangnya diskursus ini yaitu adanya konsolidasi antara negara dengan sistem internasional (Hettne, 2008). Di periode ini negara menjadi aktor utama dalam politik global, termasuk dalam pembangunan. Pembangunan dinilai telah menjadi salah satu bagian penting dari kepentingan nasional setiap negara, khususnya negara-negara di kawasan Eropa. Sehingga diskursus yang berkembang saat itu adalah pembangunan ekonomi dengan peningkatan produksi industri sebagai salah satu elemennya utamanya. Di samping itu perkembangan pembangunan ekonomi juga didasari atas pemahaman bahwa dunia internasional itu bersifat anarki (Hettne, 2008). Atas dasar pemahaman tersebut pembangunan ekonomi ditujukan untuk dapat menunjang kebutuhan militer dan keamanan, disamping memenuhi kesejahteraan dan kebutuhan masyarakat. Dengan latar belakang itu pula negara-negara Eropa mulai membangun sebuah hegemoni yang dipimpin oleh Perancis dan Jerman.

Peran sentral negara ini pun salah satunya dapat dilihat dari bagaimana Inggris sukses dalam perencanaan pembangunan. Pemerintah Inggris memusatkan pembangunan pada industri dengan memberikan gaji tinggi bagi para pekerja dan menerapkan tarif energi yang murah bagi seluruh warga negara, khususnya industri sebagai penggerak ekonomi dan pembangunan (Allen, 2006). Inggris juga mulai mengganti fokus ekonominya dari sektor pertanian ke sektor industri. Hasilnya *income per capita* Inggris naik dengan pesat dengan aktivitas

perdagangan yang terus meningkat pula (Engerman & O'Brien, 2004). Usaha Inggris ini pun juga tidak lepas dari mulai terbangunnya diskursus pembangunan ekonomi, yang memang berfokus pada peningkatan kapasitas produksi industri. Meluasnya penggunaan diskursus pembangunan ekonomi dilatarbelakangi oleh ketakutan akan ketertinggalan pembangunan dengan berusaha mengejar pembangunan negara-negara Barat (Hettne, 2008). Belum lagi, kemunculan diskursus ini juga bertepatan dengan masa kolonialisasi yang dialami oleh negara-negara di kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin.

Namun diskursus ini kemudian memunculkan banyak kritik dari berbagai pihak, salah satunya dari Max Weber. Ia berpendapat bahwa model pembangunan yang cenderung kapitalis ini akan sangat beresiko, karena harus mengorbankan nilai-nilai budaya dan tradisi yang masih dipegang oleh masyarakat tradisional (Lowy, 2006). Tidak hanya Max Weber, kritik juga diutarakan oleh *Narodkins*, sebuah gerakan sosialis yang berasal dari Rusia (Encyclopedia Britannica, 2018). Bahwa diskursus pembangunan ekonomi tersebut cenderung lebih berorientasi secara subjektif pada pihak-pihak tertentu, daripada berorientasi pada setiap individu masyarakat yang seharusnya lebih diperhatikan (Hettne, 2008).

2.1.3 Masa Perkembangan Rencana Pembangunan

Tidak banyak perkembangan yang terjadi setelah masa industrialisasi. Namun ekonomi liberal melalui pembangunan ekonomi yang dikonstruksi oleh negara-negara Eropa banyak mengalami hambatan secara internal dan eksternal pada masa Perang Dunia I dan Perang Dunia II. *Balance of power system*, standar emas,

self-regulating market, dan negara liberal tidak mampu menghadapi ketidakstabilan kondisi global (Hettne, 2008). Keterpurukan ekonomi pun menjadi salah satu penghambat besar dalam pembangunan di berbagai negara, terutama bagi negara-negara Eropa.

Kondisi ini memicu negara untuk kembali terlibat dalam mengatur perekonomian dunia agar mempermudah dalam mencapai proyek modernisasi yang sedang mereka canangkan. Uni Soviet juga merespon ketidakpastian global dengan merancang pembangunan ekonomi lima tahun (*Five Year Plan*). Rencana pembangunan lima tahun ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1928 dengan fokus pengembangan industri besi dan baja, mesin-mesin industri, transportasi, dan energi listrik (Simkin, 2018). Mereka pun mulai mengembangkan sistem ekonomi fasis, karena melihat ekonomi liberal yang dikembangkan oleh negara-negara Eropa tidak dalam kondisi yang stabil (Hettne, 2008). Meskipun demikian, adanya dua model perekonomian yang berkembang ini menimbulkan gerakan anti-liberal dan anti-komunis. Namun kritik dari akademisi, beberapa politisi dan pemimpin negara lebih banyak tertuju pada pembangunan kapitalisme. Mereka berpendapat bahwa pembangunan kapitalisme dan nilai modernitas yang diangkat sangat berkontradiksi dengan dengan eksistensi etnis, moralitas, dan agama (Hettne, 2008).

Merujuk pada tulisan Aram Ziai, diskursus yang berkembang pada periode ini dapat pula disebut diskursus kolonialisme. Karena dalam periode ini banyak negara di kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang dijajah oleh negara-negara Barat dengan dalih membantu pembangunan. Faktanya negara-negara Eropa yang telah mengalami Abad Pencerahan memiliki kondisi ekonomi

dan pembangunan yang baik, seperti yang digambarkan oleh Joel Mokyr, dalam tulisannya yang berjudul "*The European Enlightenment, the Industrial Revolution, and Modern Economic Growth*". Dalam tulisannya tersebut Joel Mokyr menyatakan bahwa negara-negara yang telah mengalami Abad Pencerahan menjadi negara yang kaya serta masyarakatnya menjadi masyarakat urban yang terdidik (Mokyr, 2007). Bangsa-bangsa yang tinggal di negara-negara kawasan Asia, Amerika Latin, dan Afrika, dianggap sebagai bangsa yang masih terbelakang. Di sisi lain, karena merasa memiliki pengalaman lebih, negara-negara Eropa memiliki perasaan superioritas yang menganggap bahwa mereka memiliki tanggungjawab untuk dapat memajukan negara-negara di ketiga kawasan tersebut (Ziai, 2016). Sehingga pola yang terjadi saat yaitu terbentuknya dua divisi dunia, yaitu bangsa beradab dan bangsa yang tidak beradab (Ziai, 2016). Dengan bangsa Eropa dan Amerika sebagai bangsa beradab serta bangsa Asia, Afrika, dan Amerika Latin sebagai bangsa yang tidak beradab.

Upaya yang negara-negara Eropa tersebut lakukan adalah dengan ikut mengintervensi pembangunan di mereka. Padahal tujuan dibalik tujuan baik tersebut, mereka ingin menguasai sumber daya alam negara yang ada di ketiga kawasan tersebut demi kepentingan pembangunan bagi negara-negara Eropa. Sehingga merujuk pada tulisan Aram Ziai, diskursus pembangunan yang saat itu berkembang dapat disebut pula sebagai diskursus pembangunan kolonialisasi. Dimana pembangunan dan bantuan dari bangsa Barat hanyalah sebuah kamufase untuk memuluskan kepentingan mereka di ketiga kawasan tersebut. Salah satu bentuk pembangunan kolonial ini terjadi di Tanzania, ketika

Jerman mengkolonialisasi negara tersebut (Bendix, 2012). Kebijakan untuk memperbaiki kondisi kesehatan warga negara Tanzania hanyalah bentuk sebuah respon atas kekurangan pekerja untuk industri Jerman, sekaligus legitimasi agar mereka bisa masuk ke Tanzania (Bendix, 2012).

2.1.4 Masa Pemetaan Negara Miskin-Kaya

Diskursus pembangunan keempat ini muncul pasca Perang Dunia II. Diskursus ini terbentuk bukan hanya dari faktor adanya persaingan dua sistem politik dan ekonomi (liberal dan sosialis), tetapi juga adanya ancaman nuklir antara Uni Soviet dan Amerika Serikat (Hettne, 2008). Sehingga kedua negara saling berlomba-lomba untuk menarik banyak aliansi dari negara-negara netral atau negara Dunia Ketiga, melalui bantuan pembangunan. Oleh karena itu, Amerika Serikat bersama dengan negara-negara Barat aliansinya mulai membentuk sistem ekonomi liberal untuk menandingi sistem ekonomi sosialisme yang dibentuk oleh Uni Soviet (Banda, 2004). Di sisi lain, tindakan ini juga disebabkan oleh ketakutan negara-negara Barat sebagai negara liberal akan pengaruh yang komunisme di beberapa negara di dunia (Banda, 2004). Akibatnya pada saat yang sama muncul sistem ekonomi liberal dan perdagangan bebas, serta berbagai regulasi perekonomian lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan, menyerap tenaga kerja, dan perlindungan sosial. Seluruh aspek tersebut kemudian dijadikan dalam sebuah sistem yang diwakili oleh standar pertumbuhan ekonomi. Dalam diskursus ini, menguatnya pembangunan ekonomi terinspirasi dalam teori Keynesian dan pengalaman dari *The Great Depression* (Hettne, 2008). Namun di saat yang sama, muncul *non-capitalist*

development dan *socialist-oriented strategy* untuk mengimbangi diskursus pembangunan yang dibangun oleh negara-negara Barat tersebut (Hettne, 2008).

Dalam konteks ini pembangunan dinilai sebagai sebuah proses evolusi dan negara terbelakang tampak dari adanya perbedaan ekonomi, politik, sosial, dan budaya antara yang kaya dan yang miskin (Hettne, 2008). Selain itu, tradisi atau hal yang berkaitan dengan nilai atau kearifan lokal dianggap sebagai penghambat pembangunan suatu negara. Pembangunan berbasis industrialisasi pun juga mulai gencar dilakukan, dengan menempatkan industri sebagai pelaku utama dalam penerapan strategi pembangunan.

Merujuk pada tulisan Aram Ziai, diskursus yang berkembang pada periode ini dapat pula disebut diskursus kapitalisme. Kemiskinan menjadi isu yang paling sering diangkat, yang juga digunakan sebagai bagian dari legitimasi perlunya sebuah pembangunan (Ziai, 2016). Diskursus kapitalisme ini pula yang secara perlahan mengkonstruksi bahwa dunia terbagi dalam dua wilayah, yaitu Utara dan Selatan. Ziai pun menyimpulkan bahwa dalam diskursus ini, negara-negara Selatan merupakan negara bekas jajahan dengan *per-capita-income* dan *Gross National Product* rendah, yang menyebabkan pembangunan mereka menjadi terhambat (Ziai, 2016). Sehingga, satu-satunya cara untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut adalah pembangunan dalam bentuk modernisasi, investasi, dan transfer teknologi (Ziai, 2016). Secara sederhana konstruksi yang terbangun saat itu adalah negara-negara yang pernah mengalami kolonialisasi termasuk kategori negara Selatan dengan status *underdeveloped countries*. Sedangkan negara

kolonial termasuk kategori sebagai negara Utara dengan status *developed countries*.

Implikasi yang terjadi adalah munculnya ketergantungan suatu negara dengan negara lain. Salah satu kasus yang terjadi adalah negara-negara jajahan di kawasan Amerika Latin yang tergantung dengan negara-negara Eropa untuk merekonstruksi pembangunan dan perekonomian mereka. Kondisi ini pun diakui oleh Presiden Truman bahwa status-status negara ini melibatkan kepentingan nasional Barat, terutama Amerika Serikat (Ziai, 2016). Dimana mereka harus memiliki pasar untuk barang-barang yang telah mereka produksi untuk dijual, sekaligus membendung ideologi komunis Uni Soviet agar tidak dianut oleh negara-negara tersebut (Ziai, 2016). Sehingga mereka harus memposisikan diri sebagai pihak pemberi solusi bagi permasalahan kemiskinan di negara-negara Selatan, mentransfer nilai-nilai yang dianut bangsa Barat, serta mengintegrasikan mereka ke dalam rezim ekonomi global.

Jelas, ketergantungan ini hanya menguntungkan negara-negara Utara, daripada negara-negara Selatan sebagai negara yang paling banyak memasok kebutuhan negara-negara Utara (Krüger, 2008). Label-label yang digunakan untuk menciptakan stigma negara miskin dan terbelakang pun hanya digunakan oleh negara-negara Barat sebagai legitimasi untuk melakukan intervensi dengan dalih pembangunan (Banda, 2004). Meskipun terbantu, negara-negara Selatan jauh lebih dirugikan dengan adanya diskursus ini. Karena mau tidak mau mereka harus-paling-tidak menyamai standar status negara maju (*developed countries*), seperti mengejar standar pertumbuhan ekonomi dan fokus dalam

pembangunan industri (Banda, 2004). Diskursus ini pun mulai memicu kritik seiring dengan adanya diskursus pembangunan lain yang muncul, seperti *indigenous development*, *eco-development*, *ethno-development*, *human development*, dan lain sebagainya (Hettne, 2008).

2.2 Diskursus Pembangunan Global: Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi menjadi diskursus pembangunan yang masih bertahan hingga abad ke-21. Mampu bertahannya diskursus pembangunan ekonomi ini memiliki pola yang mirip dengan diskursus-diskursus dominan yang pernah muncul di beberapa abad sebelumnya. Yaitu dari mulai kemunculannya pertama kali yang mendapat dukungan dari berbagai negara dan beberapa aktor global lainnya yang cukup kuat dan berpengaruh. Di samping itu, dengan banyak negara yang berada dalam titik terendahnya pasca perang, sekaligus terdapat urgensi untuk memulihkan keadaan, menjadikan pembangunan ekonomi sebagai pilihan utama. Oleh karena itu bagian ini akan menjelaskan secara komprehensif garis waktu kemunculan pembangunan ekonomi. Pengalaman dan perbaikan sistem selama periode pembentukan tersebut akan menjadi salah satu unsur penting dalam penjelasan akhir mengenai pembangunan ekonomi yang muncul sebagai diskursus dominan pembangunan global.

2.2.1 Pembangunan Ekonomi

Dari segi bahasa, dalam sebuah tulisan dengan judul "*Development and Development Paradigms: A (Reasoned) Review of Prevailing Visions*" yang dipublikasikan oleh *Food and Agriculture Organization of The United Nations (FAO)* pada tahun 2011, pembangunan merupakan sebuah aktivitas yang merubah

situasi ke dalam tahapan baru atau proses perubahan (Bellu, 2011). Sedangkan menurut *Cambridge Dictionary*, pembangunan merupakan sebuah proses pertumbuhan atau perubahan yang dialami oleh seseorang atau sesuatu menjadi lebih baik (Cambridge University Press, 2018). Merujuk pada pengertian tersebut, tidak diragukan lagi apabila pembangunan menjadi salah satu sektor strategis yang menjadi fokus dan perhatian dari kebijakan setiap negara, baik dalam lingkup domestik maupun internasional. Pentingnya pembangunan bagi sebuah negara juga tidak lepas dari efek domino positif yang ditimbulkan, seperti penurunan tingkat kesejahteraan rakyat, peningkatan angka kemiskinan, dan berbagai hal lainnya. Sehingga untuk dapat mengoptimalkan dampak yang diberikan, negara harus dapat menggunakan indikator yang jelas untuk dapat memacu sekaligus mengukur seberapa jauh keberhasilan pembangunan yang telah dilakukan.

Dalam perkembangannya, pembangunan itu sendiri terbagi menjadi beberapa bentuk atau model, contohnya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), pembangunan ekonomi (*economic development*), pembangunan manusia (*human development*), dan pembangunan wilayah (*territorial development*) (Bellu, 2011). Dari seluruh bentuk pembangunan tersebut, pembangunan ekonomi menjadi rujukan utama oleh mayoritas negara di dunia. Menurut Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith dalam bukunya yang berjudul "*Economic Development*", pembangunan ekonomi merupakan sebuah proses yang bersifat multidimensional yang melibatkan perubahan besar struktur sosial masyarakat, perilaku, institusi nasional, sekaligus pertumbuhan ekonomi, pengurangan angka

kesenjangan dan tingkat kemiskinan (Todaro & Smith, 2011).

Istilah pembangunan ekonomi tersebut tidak lepas dari faktor pertumbuhan ekonomi yang digunakan sebagai indikator utama keberhasilannya. Sehingga negara yang menggunakan bentuk pembangunan ini cenderung berfokus pada peningkatan aktivitas perekonomian dan perbankan, yang merupakan beberapa elemen dari pembangunan ekonomi. Mereka akan berusaha meningkatkan produksi barang, jasa dan berbagai hal lainnya agar mampu meningkatkan investasi dan tingkat konsumsi penduduknya (Bellu, 2011). Implementasi model pembangunan ekonomi ini sesuai dengan pendapat Amartya Sen yang mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai sebuah aktivitas ekspansi kapasitas produksi dengan pemberdayaan individu, firma atau usaha mikro, dan komunitas masyarakat yang potensial (Feldman, Hadjimichael, Lanahan, & Kemeny, 2016). Sehingga jika aktivitas perekonomian semakin banyak, maka akan meningkat pula pertumbuhan ekonomi dan tingkat keberhasilan pembangunan negara tersebut.

2.2.2 Pembangunan Ekonomi dan *Growth Domestic Product (GDP)*

Salah satu indeks pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan ekonomi yang paling tua dikemukakan adalah *Gross Domestic Product*. Dalam sejarahnya, penggunaan *Gross Domestic Product* atau GDP sebagai indikator keberhasilan pembangunan ekonomi tidak lepas dari gagasan yang dikemukakan oleh Simon Kuznets pada tahun 1934 (Fogel, Simon S. Kuznets: 1901-1985, 2001).

Bermula pada peristiwa *The Great Depression* yang telah membuat negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat, sadar akan pentingnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikuatkan dengan status Simon Kuznets yang dikenal sebagai salah satu ahli ekonomi yang menekankan bahwa *The Great Depression* sebagai peristiwa penting yang penuh dengan pembelajaran dan harus direspon dengan lebih mempelajari sejarah kesalahan masa lampau tersebut (Fogel, How Simon Kuznets codified modern economic growth, 2014).

Salah satu cara ia merespon peristiwa tersebut adalah dengan membuat formulasi *Gross Domestic Product (GDP)* dalam laporannya kepada Kongres Amerika Serikat pada tahun 1934 yang berjudul "*National Income, 1929-35*" (Fogel, Simon S. Kuznets: 1901-1985, 2001). Dalam laporan tersebut, ia menyampaikan bahwa GDP digunakan untuk menghitung produksi ekonomi yang dilakukan oleh individu, perusahaan, dan pemerintah dalam satu ukuran (Dickinson, 2011). Sejak saat itu penggunaan GDP terus dikembangkan di Amerika Serikat dari tahun 1930-an hingga tahun 1940-an (Costanza, Hart, Kubiszewski, & Talberth, 2014). Di bawah pemerintahan Presiden Franklin D. Roosevelt, GDP digunakan untuk mengukur seberapa cukup ekonomi mampu mendukung keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Dunia II, yang kemudian berkembang penggunaannya sejak *Bretton Woods System* diinisiasi (Costanza, Hart, Kubiszewski, & Talberth, 2014).

Posisi dan penggunaan GDP sebagai indeks pembangunan semakin menguat pasca diadakannya *Bretton Woods Conference* pada tahun 1944 (Dickinson,

2011). Penguatan GDP tersebut tidak lepas dari keterlibatan Amerika Serikat dan Inggris dalam konferensi tersebut, dimana kedua negara mencoba mengembangkan penggunaan GDP dalam lingkup yang lebih besar (Costanza, Hart, Kubiszewski, & Talberth, 2014). Hasilnya, GDP menjadi tolok ukur pertumbuhan ekonomi yang digunakan oleh dua institusi keuangan besar dunia, IMF dan *World Bank*. Dalam perkembangannya GDP menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan global yang kemudian diadopsi oleh mayoritas negara di dunia. Hal tersebut juga tidak lepas dari GDP yang merupakan sebuah statistik ekonomi yang dapat menjadi tinjauan utama kebijakan ekonomi dan indikator aktivitas perekonomian (Costanza, Hart, Kubiszewski, & Talberth, 2014).

2.2.3 Periodisasi Pembangunan Ekonomi

Munculnya pembangunan ekonomi sebagai diskursus dominan pembangunan global melewati serangkaian periode pasang surut. Namun rangkaian proses itu pula menjadi bagian penting bagi pembangunan ekonomi menjadi diskursus pembangunan global. Periodisasi pembangunan ekonomi sendiri dapat dibagi ke dalam lima periode.

a. *The Great Depression* (1929-1939)

Periode pertama bermula pada peristiwa *The Great Depression*. Dimana pasca Revolusi Industri, dunia justru mengalami Perang Dunia I dari tahun 1914-1918. Tidak hanya korban jiwa, dampak pasca-perang tersebut juga dapat dilihat dengan kondisi ekonomi dan politik yang memburuk (Wolf, 2010). Tidak hanya Amerika Serikat, kondisi serupa juga dialami oleh beberapa negara

Eropa, seperti ekonomi Inggris yang jatuh pada pertengahan tahun 1920an, Perancis di awal 1930-an, dan Jerman di tahun 1928 (Romer, 2003). Akibatnya dunia mengalami kejatuhan ekonomi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi, yang kemudian dikenal sebagai peristiwa *The Great Depression* (Ryska, 2017). Terjadinya peristiwa *The Great Depression* tersebut terjadi akibat pengaruh dari dua faktor utama.

Pertama, yaitu jatuhnya *gold standard*. Diawali dari benua Eropa yang mengalami krisis ekonomi pada akhir tahun 1928. Krisis ini bermula dari penggunaan *gold standard* yang telah secara konsisten digunakan sejak tahun 1870, yang sekaligus merupakan hasil dari inisiasi Inggris untuk mengatur perekonomian dunia (Igwe, 2018). Namun upaya Inggris untuk menjadi pemain utama dalam ekonomi dunia tersebut justru menjadi bumerang. Memburuknya ekonomi Inggris, yang salah satunya ditandai dengan menurunnya aktivitas ekspor pasca-perang, membuat mereka tidak mampu lagi menjadi pengatur ekonomi dunia (Rothermund, 2018).

Faktor kedua yaitu jatuhnya harga produk pertanian Amerika Serikat. Kejadian ini bermula ketika pemerintah negara-negara Eropa tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan warga negaranya. Selain karena ketiadaan dana untuk mengelola pertanian, banyak air dan tanah yang sudah terkontaminasi oleh *unexploded ordinance (UXO)* dan berbagai jenis bahan kimia lainnya (Weir, 2013). Sehingga mau tidak mau mayoritas negara Eropa yang ikut terlibat dalam Perang Dunia I tersebut harus mengimpor hasil produksi pangan dari negara lain. Khususnya produk yang berasal dari Amerika Serikat, karena merupakan negara yang paling sedikit terdampak akibat perang dan sektor pertanian yang masih bisa

berjalan. Salah satunya Inggris pada tahun 1914, pasca Perang Dunia I mereka memiliki ketergantungan pasokan makanan dari negara lain, dengan prosentase 80% gandum impor, 40% daging impor, dan hampir sepenuhnya kebutuhan gula mereka juga dipenuhi dengan impor (Duffett, 2015). Akibat permintaan dari negara-negara Eropa yang cukup tinggi, harga jual produk pertanian pun menjadi naik.

Kondisi ini menjadikan Eropa menjadi kawasan yang memiliki potensi pasar yang besar bagi Amerika Serikat (Woods, 2015). Salah satunya peluang pasar sektor pertanian yang cukup besar. Sehingga Amerika Serikat kemudian terus mencoba meningkatkan produksi pertaniannya. Bahkan pada awal tahun 1920an pemerintah Amerika Serikat mulai mencanangkan mekanisasi produksi untuk meningkatkan hasil produksi pertanian sebagai upaya memenuhi permintaan pasar (Bellis, 2018). Salah satu bukti adanya mekanisasi adalah adanya peningkatan jumlah kepemilikan traktor, dari hanya 246.083 traktor di tahun 1920 menjadi 506.745 traktor di tahun 1925 (Editorial Research Reports, 1927). Namun tidak lama setelah itu, negara-negara yang terlibat dalam Perang Dunia I tersebut mulai berfikir untuk kembali memulihkan kondisi perekonomiannya. Salah satu upaya mereka untuk memulihkan kondisi perekonomian tersebut adalah dengan memproduksi sendiri bahan pangan mereka (Freeman, 2018). Bahkan negara-negara yang secara historis belum pernah memproduksi pangan sendiri, seperti Australia, New Zealand, dan Kanada, ikut mengeluarkan kebijakan tersebut (Freeman, 2018). Akibatnya terjadi *over supply* hasil pertanian di Amerika Serikat, dimana hasil produksi yang banyak tidak diimbangi dengan permintaan yang

cukup sedikit. Harga produksi pertanian Amerika Serikat pun menjadi jatuh, yang menyebabkan kembali terjadinya krisis di negara tersebut (Freeman, 2018).

b. Terbentuknya *Bretton Woods System* (1944)

Dengan pengalaman *The Great Depression* yang pernah dialami tersebut, Amerika Serikat kemudian berencana untuk membuat sistem perekonomian yang lebih stabil, menciptakan institusi yang secara otonomi khusus mengatur bidang moneter dan fiskal, menciptakan *balance of-payments* dan *balance of-deficit*, serta mencegah kebijakan negara yang proteksionis (Hall & Tavlas, 2011). Sehingga dalam kondisi Perang Dunia II yang masih berlangsung, pada tahun 1944 pemerintah Amerika Serikat mengadakan pertemuan untuk membahas masa depan sistem ekonomi yang akan mereka bangun pasca Perang Dunia II melalui *UN Monetary and Financial Conference*. Lokasi pertemuan itu sendiri berada di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat dan berlangsung kurang lebih 21 hari, mulai tanggal 1 hingga 21 Juli 1944 (Amadeo, *Bretton Woods System and 1944 Agreement*, 2018). Pertemuan yang dihadiri oleh lebih dari 40 negara tersebut melibatkan dua ahli ekonomi, yaitu John Maynard Keynes yang berasal dari Inggris dan Harry Dexter White yang berasal dari Amerika Serikat.

Pertemuan tersebut menghasilkan dua poin utama. Pertama, yaitu disepakatinya standar nilai tukar yang mengacu pada dolar Amerika dengan nilai 35 dolar Amerika per satu ons emas (Bordo, 2017). Kedua, yang merupakan poin perjanjian yang paling penting dalam hasil konferensi ini, yaitu dibentuknya dua institusi keuangan internasional, yaitu *The International Bank for*

Reconstruction and Development (IBRD) dan *International Monetary Fund* (IMF) (Igwe, 2018). Meskipun IBRD, yang kemudian disebut dengan *World Bank*, baru mulai secara resmi beroperasi pada tahun 1946. Sedangkan IMF baru mulai beroperasi secara efektif mulai tahun 1947 (Heywood, 2017). Kehadiran kedua institusi keuangan dan standar nilai tukar tersebut menandakan hadirnya sebuah sistem ekonomi baru yang dikenal dengan *Bretton Woods System*. Secara bertahap sistem ini dipergunakan oleh hampir seluruh negara di dunia. Penggunaan sistem tidak lepas dari kondisi ekonomi dan politik yang buruk pasca terjadinya Perang Dunia II, dimana banyak negara yang berusaha memperbaiki kondisi ekonomi dan pembangunan, sekaligus menyelesaikan permasalahan kemiskinan akibat perang yang berkepanjangan (Islam, 2018).

c. Masa Emas *Bretton Woods System* (1945-1971)

Pasca Perang Dunia II, kondisi perekonomian dunia masih belum terlalu stabil, namun secara perlahan terus membaik. Meningkatnya aktivitas industri otomotif, penerbangan, dan elektronik, menjadi beberapa bukti bahwa perekonomian dunia saat itu sudah mulai normal pasca-perang (U.S Departement of State, 2018). Di Amerika Serikat sendiri, membaiknya perekonomian didorong oleh dua faktor. Pertama, yaitu kembalinya para personel militer Amerika Serikat dari medan perang. Kedatangan mereka diikuti dengan banyaknya pembangunan permukiman baru. Secara tidak langsung kondisi ini mendorong industri yang memproduksi bahan bangunan kembali beroperasi, karena permintaan pasar yang terus meningkat. Kedua, yaitu adanya peristiwa "*baby boom*", yang merupakan kondisi ketika angka

kelahiran menjadi meningkat cukup signifikan (U.S Departement of State, 2018). Sehingga dengan jumlah penduduk Amerika Serikat menjadi sangat banyak serta kebutuhan yang meningkat, kondisi ini turut mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat yang ikut meningkat.

Membaiknya kondisi perekonomian dunia tersebut ternyata tidak berlaku bagi negara-negara Eropa, terutama bagi mereka yang mengalami kekalahan dalam perang. Di sisi lain, Uni Soviet yang tadinya bekerjasama dengan Amerika Serikat untuk melawan Nazi justru membuat kondisi politik pasca-perang semakin tidak kondusif. Uni Soviet secara bertahap menduduki negara-negara di kawasan Eropa Timur dan Eropa Tengah (Constitutional Rights Foundation, 2015). Bagi Amerika Serikat, kondisi ekonomi dan politik Eropa yang tidak stabil Pasca Perang Dunia II tersebut justru memicu kekhawatiran adanya potensi penyebaran ideologi komunisme oleh Uni Soviet. Ancaman ini juga diutarakan oleh Perdana Menteri Inggris saat itu, Winston Churchill, bahwa terdapat “tirai besi” yang memisahkan antara Eropa Barat dengan Eropa Timur, dengan ancaman komunisme yang berpeluang menyebar dengan memanfaatkan situasi pasca-perang (Constitutional Rights Foundation, 2015). Sehingga presiden Amerika Serikat yang menjabat saat itu, Harry S. Truman, berpendapat bahwa solusi agar negara-negara Eropa tidak terpengaruh dengan adanya ideologi komunisme adalah dengan menciptakan kestabilan politik di Eropa melalui pemulihan kondisi ekonomi Eropa.

Sebagai respon atas pendapat Presiden Truman, pada tanggal 5 Juni 1947 George C. Marshall mengumumkan peluncuran program bantuan luar negeri

untuk merekonstruksi ekonomi negara-negara Eropa yang dinamakan *European Recovery Program (ERP)* (CSR Report, 2018). Meskipun dalam perkembangannya program ini lebih dikenal dengan *Marshall Plan*. Pemberian bantuan ini diberikan dalam dua bentuk, yaitu dana hibah dan pinjaman. Sehingga negara-negara Eropa yang terlibat dalam *Marshall Plan* tersebut juga memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang yang telah dipinjamkan oleh Amerika Serikat.

Dalam waktu kurang dari lima tahun, *Marshall Plan* memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian dunia, terutama Eropa dan Amerika Serikat. Berdasarkan data dari “*American Foreign Assistance*” yang ditulis oleh William Adams Brown Jr dan Redvers Opic, indeks produksi industri Eropa mengalami peningkatan dari indeks 100 di tahun 1938 menjadi 135 di tahun 1951 (CSR Report, 2018). Peningkatan tersebut juga terjadi pada sektor pertanian, dimana indeks produksi meningkat dari 100 di awal tahun 1940-an menjadi 111 di tahun 1951. Secara keseluruhan, setelah ada *Marshall Plan* produksi industri dan pertanian Eropa mengalami peningkatan masing-masing sebanyak 35% dan 11% (CSR Report, 2018). Bahkan mayoritas negara-negara Eropa mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi antara 15%-20% (Sommerlad, 2018).

Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini bukan hanya disebabkan dari adanya *Marshall Plan*, tetapi juga faktor *Bretton Woods System*, terutama dengan kemunculan IMF dan *World Bank* (The Departement of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, 2017). Hal ini tidak lepas dari kebijakan Amerika Serikat untuk melibatkan kedua institusi tersebut untuk ikut mengelola *Marshall Plan* dalam hal pemberian

pinjaman dan pembayaran hutang (New American Nation, 2018). Dalam hal ini, IMF berperan untuk menjaga *balance of payment* dari negara peminjam dan mengatur nilai tukar mata uang (Islam, 2018). Sedangkan *World Bank* bertugas untuk meminjamkan uang untuk pembangunan suatu negara.

d. Runtuhnya *Bretton Woods System* (1971-1973)

Dalam praktiknya, *Bretton Woods System* baru secara efektif berjalan pada tahun 1959 (Bordo, 2017). Meskipun merupakan hasil kesepakatan yang berasal dari 40 negara lebih, namun hampir sepenuhnya sistem tersebut dikontrol dan didominasi oleh Amerika Serikat. Namun dominasi Amerika Serikat dalam *Bretton Woods System* ini justru menimbulkan banyak permasalahan. Pertama, yaitu krisis minyak yang terjadi pada tahun 1973. Krisis ini bermula ketika negara-negara Arab terlibat konflik dengan Israel, yang lebih dikenal dengan peristiwa *Six-Day War* (Cane, 2013). Keterlibatan Amerika Serikat dalam rangkaian persetujuan negara-negara Arab dengan Israel pun justru membuat bencana bagi perekonomian dunia. Dimana, negara-negara Arab yang tergabung dalam *The Organization of Arab Petroleum Exporting Countries (OAPEC)* melakukan embargo ke Amerika Serikat dan Eropa (Darmstadter, 2013).

Kebijakan embargo tersebut menyebabkan Amerika Serikat tidak dapat membeli lagi minyak dari OPAEC. Di saat yang sama, OAPEC juga menaikkan harga minyak dunia dari 10.64 dolar Amerika per barel di tahun 1970 menjadi 17.00 dolar Amerika per barel di tahun 1973 (BP, 2013). Kondisi ini mengakibatkan kelumpuhan perekonomian di Amerika Serikat, karena

industri yang berperan sebagai sentral kegiatan perekonomian dan katalis pembangunan tidak dapat berjalan dengan baik. Namun dampak naiknya harga minyak tersebut lebih terasa di Eropa daripada di Amerika Serikat, yang saat itu sedang dalam masa rekonstruksi pasca-perang. Embargo tersebut menyebabkan sumber utama pendapatan mayoritas negara-negara Eropa, yaitu industri, menjadi terhambat. Jatuhnya nilai mata uang dolar Amerika

Faktor kedua, yaitu terlalu banyaknya dolar Amerika yang beredar di pasaran. Kondisi ini terjadi karena Amerika Serikat gencar memberikan bantuan luar negeri, pembiayaan militer, dan investasi luar negeri yang berdampak banyak digunakannya dolar Amerika sebagai mata uang utama dalam kegiatan transaksi di dunia (US Office of the Historian, Bureau of Public Affairs, 2018). Hal ini berdampak pada nilai konversi emas ke dolar menjadi menurun drastis dan terjadi penurunan nilai mata uang dolar Amerika. Akibatnya, Amerika Serikat yang sempat menguasai 3/4 saham dunia di awal tahun 1959 pun menurun hingga hanya menguasai sekitar 1/4 saham saja di tahun 1968 (Hall & Tavlas, 2011).

Kondisi ini pun secara cepat direspon oleh pemerintah Amerika Serikat. Di bawah pemerintahan Presiden John F. Kennedy, pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan berbagai kebijakan penyesuaian, seperti pembatasan peminjaman hutang, mengurangi investasi luar negeri, reformasi moneter internasional, dan lain sebagainya. Namun solusi yang dibuat ternyata tidak mampu menyelamatkan nilai dolar Amerika yang terus turun. Usaha tersebut berlanjut ke pemerintahan Richard Nixon. Pasca dua hari pertemuan, pada tanggal 15 Agustus 1971 Presiden Nixon pun

mengumumkan “*The New Economic Policy: The Challenge of a Peace*” (Richard Nixon Foundation, 2014). Meskipun kebijakan tersebut mampu membantu perekonomian Amerika Serikat, tetapi di saat yang sama kebijakan Presiden Nixon tersebut juga menandai berakhirnya masa *Bretton Woods System*.

e. *Washington Consensus*

Diliputi rasa khawatir tidak bisa mengejar ketertinggalan pembangunan pasca perang, banyak negara yang baru merdeka menerapkan *import-substitution policy* (Arnaut, 2015). Inisiasi kebijakan ini merupakan usaha dari negara-negara tersebut untuk memaksimalkan potensi produsen lokal, agar dapat berkembang dengan cara menutup akses dari kompetisi ekonomi global. Salah satu mekanisme yang digunakan adalah dengan memberlakukan tarif impor. Dengan pemberlakuan tarif tersebut, secara tidak langsung akan memberdayakan dan memperkuat produsen lokal, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan lapangan pekerjaan (Arnaut, 2015). Ternyata kebijakan tersebut justru menimbulkan permasalahan baru. Banyak industri lokal yang berada di negara-negara baru yang tidak dapat bertahan dan berakhir bankrut. Dengan sifat *import-substitution policy* yang cenderung proteksionis, adanya kebijakan ini secara tidak langsung menutup pasar dan akses terhadap pasar global. Dampaknya negara-negara tersebut terpaksa berhutang dengan negara lain untuk dapat menutupi kondisi perekonomian yang mulai tidak stabil.

Krisis hutang tersebut kemudian menjadi salah satu warisan *Bretton Woods System* pasca runtuh di tahun 1973. Tidak hanya negara-negara Eropa, negara-negara

yang masih baru merdeka pun mengalami kondisi dimana mereka tidak mampu melunasi hutang-hutangnya. Contohnya negara-negara berkembang, khususnya yang berada di kawasan Amerika Latin, seperti Meksiko dan Kuba. Ironinya beberapa negara tersebut masih tergolong baru merdeka dari penjajahan dan belum memiliki sumber pemasukan negara untuk menutup hutang. Padahal hutang tersebut juga mereka gunakan untuk keperluan memulihkan kondisi sosial, ekonomi, dan pembangunan. Di Eropa sendiri negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia II, seperti salah satunya Jerman, juga terjebak dalam krisis hutang pasca perang (Buckmeier, 2015).

Dengan krisis hutang yang semakin parah, banyak ilmuwan atau ahli ekonomi yang kemudian mencari solusi untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Salah satu ahli ekonomi tersebut adalah John Williamson yang merupakan seorang ahli ekonomi dari Inggris. Selama karirnya ia pernah bekerja untuk *Institute for International Economics* yang merupakan sebuah organisasi non-profit yang berfokus sebagai *think tank* dalam ekonomi internasional (Komlik, 2017). Dalam sebuah konferensi yang diadakan pada tahun 1989, Williamson mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan sebuah makalah mengenai kondisi Amerika Latin yang sedang mengalami krisis. Melalui makalah tersebut, Williamson mengajukan rekomendasi kebijakan bagi IMF dan *World Bank* untuk dapat ikut menyelesaikan permasalahan hutang yang dialami oleh banyak negara, terutama di kawasan Amerika Latin tersebut (Komlik, 2017).

Kebijakan rekomendasi yang disebut *Washington Consensus* tersebut terdiri dari sepuluh poin,

yaitu: (1) Disiplin kebijakan fiskal, (2) Pengalihan belanja subsidi pada belanja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, kecuali subsidi langsung, (3) Reformasi pajak –memperluas basis pajak dan penurunan tingkat pajak, (4) Suku bunga yang ditentukan pasar dan positif secara riil, (5) Nilai tukar kompetitif, (6) Liberalisasi perdagangan, terutama penghapusan lisensi dan penerapan tarif tunggal, (7) Liberalisasi investasi langsung asing, (8) Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), (9) Deregulasi –penghapusan regulasi yang menghambat persaingan, kecuali untuk menjaga keamanan, lingkungan, perlindungan konsumen, dan pengawasan lembaga keuangan, dan (10) Perlindungan hak milik. Hasilnya, sepuluh kebijakan yang terdapat dalam *Washington Consensus* tersebut disetujui oleh para ahli ekonomi dan pengambil kebijakan dari Amerika Serikat serta Amerika Latin (Arnaut, 2015).

2.2.4 Pembangunan Ekonomi Sebagai Diskursus Dominan

Dari penjelasan sebelumnya dapat terlihat bahwa pembangunan ekonomi sebagai diskursus pembangunan sudah mulai terbentuk sejak peristiwa *The Great Depression* (Ukai, 2016). Keterpurukan yang dialami oleh negara-negara Barat memunculkan kesadaran akan pentingnya memiliki *supporting system* dalam pembangunan. Sehingga Amerika Serikat, Inggris, dan aliansinya memutuskan untuk menginisiasi sebuah sistem ekonomi yang dikenal dengan *Bretton Woods System* (The Office of the Historian, 2017). Dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi global dan aktivitas perdagangan global, adanya sistem ini secara tidak langsung menjadikan pertumbuhan ekonomi mulai

dipandang penting keberadaannya sebagai indikator keberhasilan pembangunan global (Bordo, 2017).

Mekipun *Bretton Woods System* sempat mendominasi secara global, sistem ini mulai runtuh di antara tahun 1968 dan 1973 (International Monetary Fund, 2018). Akhirnya disepakatilah *Washington Consensus* sebagai *safety net* agar *Bretton Woods System* yang tersisa, yaitu IMF dan *World Bank*, dapat berjalan dengan baik dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi untuk menunjang pembangunan negara. Dari titik itu kemudian negara-negara Barat berusaha untuk memperbaiki halangan yang dianggap bisa menghambat pertumbuhan ekonomi dan menjadikan GDP sebagai indikator keberhasilan pembangunan global.

Terlihat bahwa *The Great Depression* memberikan pengalaman berharga bagi negara-negara Barat untuk menciptakan institusi moneter sebagai pendukung sebuah sistem ekonomi. Pengalam inilah yang kemudian menjadi pendorong terbentuknya IMF dan *World Bank*. Dengan peran penting tersebut, kehadiran IMF dan *World Bank* memiliki peran penting sebagai penghubung yang digunakan oleh negara-negara Barat untuk mengintegrasikan negara-negara di kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin ke dalam rezim ekonomi global. Hal ini pun juga diutarakan oleh Patrick Aondoakaa Tion dalam tulisannya yang berjudul “*The International Monetary Fund (IMF) and World Bank: An Assessment of the Role of Africa's Integration Into Global Economic System*”. Bahwa ketika dunia mengalami krisis hutang pada tahun 1980-an, melalui IMF dan *World Bank*, Amerika Serikat memanfaatkan momentum ini untuk mengontrol negara-negara Selatan melalui *Structural Adjustment Programmes (SAP)* (Tion, 2014).

Hal ini pun juga diutarakan oleh Ha-joon Chang dalam tulisannya yang berjudul *Institutions and economic development: theory, policy, and history*. Dimana terdapat istilah *Global Standard Institutions (GSI)* untuk menjelaskan bagaimana IMF dan *World Bank* memberikan banyak syarat khusus (*adjustment*) yang memaksa suatu negara mengadopsinya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, sebelum keduanya memberikan bantuan terhadap negara pemohon (Chang, 2011). Tidak hanya IMF dan *World Bank*, tekanan untuk berintegrasi ke rezim ekonomi internasional juga datang dari perjanjian perdagangan dan investasi bilateral, regional, multilateral (Chang, 2011). Kondisi ini mirip seperti yang telah diutarakan oleh Presiden Harry S. Truman, bahwa negara-negara Barat akan berusaha mengintegrasikan negara-negara berkembang ke dalam rezim ekonomi global agar pembangunan ekonomi sebagai diskursus yang sudah mereka bentuk digunakan oleh seluruh negara. Sehingga integrasi inilah yang nantinya akan ikut mendorong pembangunan ekonomi menjadi diskursus pembangunan global dunia. Hal ini sesuai dengan pemahaman diskursus dominan, yang memiliki peran sekaligus dipergunakan untuk mengontrol, mengatur, dan mendisiplinkan pihak-pihak lain yang dituju (Bendix, 2012).

Demikian pula ketika Amerika Serikat dan aliansinya menyetujui *Washington Consensus*. Hal ini tidak lepas dari kebijakan proteksionis yang pernah mereka gunakan dalam pembangunan ekonomi tidak membawa dampak yang cukup signifikan. Bahkan kemudian negara justru dipandang sebagai sebuah halangan bagi pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat (Ahrens, 1999). Disetujuinya *Washington Consensus* ini juga berkaca pada pengalaman saat

terjadinya *The Great Depression*, bahwa membuka pasar dan investasi serta memperkecil keterlibatan negara dalam perekonomian merupakan solusi terbaik untuk dapat meningkatkan perekonomian dan pembangunan. Pengalaman dan alat-alat yang dimiliki oleh negara-negara Barat inilah yang kemudian menjadi bagian dari kekuatan untuk mempromosikan pembangunan ekonomi, agar dapat diimplementasikan oleh negara di seluruh dunia. Sehingga secara otomatis pembangunan ekonomi dapat menjadi diskursus pembangunan global.

Proses pembangunan ekonomi menjadi diskursus pembangunan global, sekaligus menjadi sesuatu yang *mainstream*, dapat dilihat melalui kasus Amerika Latin yang diangkat oleh Ade Marup Wirasenjaya dalam tulisannya yang berjudul “*Strukturisasi Norma: Pengarusutamaan Gagasan Neoliberal dalam Pembangunan di Negara Pasca Kolonial (Pengalaman Amerika Latin dan Asia)*”. Diawali krisis tahun 1982 yang melanda Meksiko, pada tahun 1980-an krisis ekonomi menyebar ke seluruh negara kawasan Amerika Latin (RaboResearch, 2013). Kondisi ini memaksa negara-negara tersebut untuk meminjam uang dari IMF, sebagai salah satu lembaga keuangan hasil dari *Bretton Woods Conference* inisiasi negara-negara Barat. Di saat yang sama, mereka harus melakukan *structural adjustment* untuk dapat meminjam uang. Beberapa bentuknya adalah menurunkan tarif impor, membuka pasar bagi investor, pembukaan kesempatan adanya jaringan perusahaan multinasional, privatisasi, dan reformasi undang-undang perburuhan (Wirasenjaya, 2012). Karena begitu banyaknya negara yang melakukan *structural adjustment*, periode tahun 80-an hingga 90-an

dianggap sebagai periode *structural adjustment* Amerika Latin (Wirasenjaya, 2012).

Selain dalam kondisi krisis dan membutuhkan dana untuk pemulihan, bergabungnya Amerika Latin ke dalam rezim ekonomi global tidak lepas dari kebijakan proteksionis yang pernah mereka ambil terbukti tidak mampu membuat perubahan perekonomian yang lebih baik. Secara tidak langsung, kebijakan proteksionis ini menunjukkan bahwa intervensi negara dalam kegiatan perekonomian ternyata hanya memberikan dampak negatif saja. Kondisi ini sangat sesuai dengan apa yang pernah dikonstruksi oleh negara-negara Barat sebelumnya, khususnya pada masa pembagian antara negara miskin dengan negara kaya. Bahwa negara-negara bekas jajahan merupakan negara yang tertinggal pembangunannya. Untuk dapat mengejar ketertinggalan, maka negara-negara berkembang tersebut harus menggunakan cara yang pernah digunakan oleh negara-negara maju. Cara-cara ini pun merupakan hasil dari sekian lama pasang surut pembangunan ekonomi yang telah coba dibangun sejak lama. Peristiwa di Amerika Latin pun menjadi titik permulaan pembangunan ekonomi menjadi diskursus pembangunan global. Satu persatu negara di dunia mulai menerima pembangunan ekonomi sebagai model pembangunan yang mereka secara bertahap mereka implementasikan. Secara tidak langsung pembangunan ekonomi tidak hanya dipromosikan oleh negara serta IMF dan *World Bank*, tetapi juga OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*), *Group of Seven (G7)*, *World Economic Forum*, dan berbagai forum kebijakan dan pemikir yang didominasi oleh negara-negara Barat (Chang, 2011).